

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS

Armaviani Rizka Hapsari¹, Kismartini², Amni Zarkasyi Rahman³

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk, pesatnya perkembangan pembangunan, serta keragaman aktivitas masyarakat semakin menyebabkan kompleks dan rumitnya penanganan pada pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Kudus pun menerapkan target *Zero Waste* di tahun 2030 mendatang, namun hal ini justru bertolak belakang dengan terjadinya peningkatan timbulan sampah tahunan di tahun 2023 hingga menyentuh di angka 159.061,34 ton per tahun. Pemerintah Kabupaten Kudus kemudian mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah. Permasalahan yang muncul yaitu terkait dengan seberapa efektif peran DPKPLH Kudus dalam mengelola sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Efektivitas menurut Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus belum efektif. Fenomena Pencapaian Tujuan, tujuan dari pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan serta mengubah sampah sebagai sumber daya namun tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan perda pengelolaan sampah. Pada sub fenomena kurun waktu sudah berjalan dengan baik dan sub fenomena sasaran memerlukan perbaikan. Fenomena Integrasi, kemampuan dinas untuk mengadakan komunikasi dengan masyarakat atau organisasi lain belum dapat dikatakan efektif. Pada sub fenomena prosedur, pengelolaan sampah di DPKPLH sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, sedangkan pada sub fenomena proses sosialisasi masih ditemukan masalah sehingga memerlukan perbaikan oleh dinas. Fenomena Adaptasi sudah efektif dilaksanakan. Pada sub fenomena peningkatan kemampuan dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan, forum diskusi publik, monitoring dan evaluasi bulanan; sedangkan pada sub fenomena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh DPKPLH terdapat fasilitas PDU yang belum beroperasi secara maksimal. Dalam Penelitian ini juga ditemukan permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah hal ini terkait dengan belum semua masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, proses sosialisasi yang kurang masif dan intensif, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada fasilitas PDU menjadi penyebab dalam ketidakefektifan pengoperasian PDU yang seharusnya dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kudus.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

THE EFFECTIVENESS OF WASTE MANAGEMENT IN THE HOUSING, SETTLEMENT AND ENVIRONMENT OFFICE OF KUDUS DISTRICT

Armaviani Rizka Hapsari¹, Kismartini², Amni Zarkasyi Rahman³

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The waste problem in Kudus Regency continues to experience a significant increase in waste generation every year. Population growth, the rapid development of development, and the diversity of community activities are increasingly causing complex and complicated handling of waste management. The Kudus Regency Government also implemented a Zero Waste target in 2030, but this is contrary to the increase in annual waste generation in 2023 to 159,061.34 tons per year. The Kudus Regency Government then issued a waste management policy. The problem that arises is related to how effective the role of DPKPLH Kudus is in managing waste. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of waste management in the Kudus Regency Housing, Settlement Areas, and Environment Office and identify inhibiting factors in waste management. This research uses descriptive qualitative research methods using the theory of Effectiveness according to Duncan. The results showed that waste management organized by the Housing, Settlement Areas and Environment Office of Kudus Regency has not been effective. The phenomenon of Goal Achievement, the purpose of waste management is to improve health and environmental quality and turn waste as a resource, but this goal has not been fully achieved in accordance with the waste management regulations. The time period sub-phenomenon has been running well and the target sub-phenomenon requires improvement. In the Integration phenomenon, the agency's ability to communicate with the community or other organizations cannot be said to be effective. In the procedure sub-phenomenon, waste management at DPKPLH is in accordance with the established SOP, while in the socialization process sub-phenomenon there are still problems that require improvement by the agency. The Adaptation phenomenon has been effectively implemented. In the sub-phenomenon of capacity building is carried out by conducting training, public discussion forums, monthly monitoring and evaluation; while in the sub-phenomenon of facilities and infrastructure in waste management organized by DPKPLH there are PDU facilities that are not operating optimally. This study also found problems that become inhibiting factors in waste management, this is related to not all people participating in waste management, a less massive and intensive socialization process, as well as limited budgets and human resources at PDU facilities, which are the cause of the unoptimality of PDU operations which should be able to reduce the amount of waste generation in Kudus Regency.

Keywords : Effectiveness, Waste Management, Department Of Housing, Settlement And The Environment Kudus Regency

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup sejahtera lahir maupun batin. Amanat yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut mewajibkan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan lingkungan yang bersih maka akan tercipta kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan secara lahir maupun batin memiliki dampak yang positif terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Ketidakselarasan antara lingkungan dan kesehatan maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan hidup seseorang.

Pada kenyataannya, ketidakselarasan antara lingkungan dan kesehatan dapat kita lihat pada kehidupan sekeliling kita. Seperti halnya dengan fenomena lingkungan yaitu masalah sampah yang terjadi hampir di tiap daerah. Keberadaan sampah saat ini dan di masa yang akan datang diperkirakan akan mengalami peningkatan drastis seiring dengan keragaman aktivitas manusia. Apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan, maka tentu saja akan muncul masalah lain seperti masalah lingkungan hingga masalah kesehatan.

Sampah yang terus mengalami peningkatan jumlah volume tentu akan memperburuk kondisi lingkungan hidup. Ditambah lagi dengan keberagaman jenis sampah yang bermunculan saat ini, mulai dari sampah kemasan yang berbahaya dan sampah yang jenisnya sulit terurai oleh proses alamiah. Hal ini pun diperburuk dengan adanya stigma bahwa sebagian besar masyarakat percaya bahwa sampah hanyalah barang sisa yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis apabila dijadikan sebagai sumber daya.

Persepsi keliru yang dianut oleh masyarakat mengenai sampah yang tidak berguna dan tidak bernilai ini tentu saja menjadi pandangan buruk bahwa sampah tidak memerlukan pengelolaan sampah yang benar. Masyarakat menganggap bahwa sampah hanya perlu dibuang begitu saja tanpa perlu dilakukan penanganan. Pandangan seperti itulah yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan dari pencemaran sampah. Selain itu, metode pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat juga masih terpaku pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Padahal apabila masih menganut prinsip tersebut tentu saja TPS dan TPA akan mengalami kondisi akibat tidak adanya pengelolaan sampah.

Berdasarkan data sampah dari *UN Environment Programme*, Indonesia berada di posisi kedua negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat pertama dengan angka timbulan sampah tertinggi yaitu sebesar 19,5 juta ton per tahun. PBB menetapkan bahwa negara-negara dapat mengurangi sampah plastik sebesar 80% hingga tahun 2040, namun berdasarkan data SIPSN pengelolaan sampah Indonesia di tahun 2023 saja masih berada dibawah angka tersebut yakni pengurangan sampah berada pada kisaran 15,95% dan penanganan sampah sebesar 50,29%.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pun tidak terlepas dari masalah sampah. Dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kudus berada di posisi kedua sewilayah Eks Karisidenan Pati. Dari tahun ke tahun, Kabupaten Kudus terus mengalami kenaikan timbulan sampah yang cukup signifikan. Tingginya aktivitas, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan penduduk di Kudus menimbulkan tingginya volume sampah.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Kudus No 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4, tercantum pengelolaan sampah ditujukan untuk menaikkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus dan juga kualitas lingkungannya serta mengubah sampah sebagai barang yang menjadi salah satu sumber daya. Pada Pasal 5 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memiliki wewenang untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah beserta limbahnya dengan baik dan berprinsip lingkungan sesuai pada tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2017).

Tingginya angka sampah yang tidak terkelola merupakan tanda rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sampah yang tidak mengalami pemilahan dan pemanfaatan kembali adalah beberapa faktor penyebab sampah tidak terkelola dengan baik. Untuk itu perlu mengadakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang tidak lepas dari kegiatan sosialisasi dan pembimbingan teknis pengelolaan sampah.

Diharapkan bahwa dengan penelitian ini, maka dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus serta menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus beserta dengan faktor penghambat dalam kebijakan pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan menggunakan fenomena pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

KERANGKA TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014) adalah proses mengoordinasikan dan mengorganisir sumber daya dan personel publik untuk diformulasikan, diimplementasikan, dan mengatur keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan publik. Administrasi publik menurut Nicholas Henry dalam (Keban, 2014:6) adalah kombinasi majemuk antara teori dan praktik untuk meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Gerald Caiden dalam (Thoha, 2008:89) mendefinisikan administrasi publik merupakan disiplin ilmu memberikan jawaban atas masalah-masalah pelaksanaan urusan publik (*public affairs*) serta manajemen usaha-usaha masyarakat (*public business*). Dalam hal ini, untuk menjawab permasalahan publik maka diperlukan penyelesaian secara bersama melalui campur tangan pemerintah dan berada di luar campur tangan sosial maupun swasta. Adminitrasi Publik mengalami pergeseran paradigma yang diuraikan ke dalam enam paradigma yaitu :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi
2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Publik
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi
5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik
6. Paradigma *Governance*

Kebijakan Publik

Chandler dan Plano dalam (Hesel Nogi S, 2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya strategis yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk menguasai persoalan publik. Woll dalam (Hesel Nogi S, 2003) mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah sekumpulan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga atau organisasi yang berpengaruh di masyarakat

Evaluasi Kebijakan

Pasolong (Pasolong, 2011) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan dianggap penting sebagai bentuk penilaian secara sistematis terhadap hasil implementasi. Pemerintah juga dapat melaksanakan identifikasi keberhasilan, analisis kekurangan, dan melakukan optimalisasi pada bagian yang dibutuhkan.

Efektivitas

Ravianto (Ravianto, 2014)) mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran kualitas pekerjaan yang dilakukan dan seberapa jauh orang menghasilkan *output* sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Duncan dalam (Steers, 2015) dalam menyebutkan bahwa efektivitas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah memiliki kriteria-kriteria tertentu, antara lain :

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini memerlukan penelitian yang mendalam mengenai dinamika, nuansa, serta aspek sosial yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi guna melakukan penggalian informasi dari berbagai pandangan dengan mengikutsertakan perwakilan dari dinas, petugas pelayanan publik, dan masyarakat.

Desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi realitas di lokasi penelitian secara deskriptif, menghubungkan antara sebab dan akibat dari masalah yang ada. Situs penelitian ditentukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus dengan melibatkan subjek penelitian Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau, Kepala Seksi Persampahan, Kepala Subbagian Persampahan, petugas TPA Tanjungrejo, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan

teknik *purposive sampling* untuk melakukan seleksi informan dengan menjamin keberagaman dan kedalaman informasi dengan tujuan mencapai saturasi data dimana penambahan informan tidak akan berdampak pada perubahan tema yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus merupakan upaya pemerintah daerah dalam penanganan masalah sampah. Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah memiliki nilai ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

1. Efektivitas Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

Pada penelitian ini penulis mengamati tiga gejala dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Gejala atau fenomena yang diamati peneliti adalah pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1) Pencapaian Tujuan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 yang dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam fenomena pencapaian tujuan terbagi menjadi dua sub fenomena yaitu kurun waktu dan sasaran. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

a) Kurun Waktu

Kurun waktu pencapaian dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dengan adanya pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ini. Sejalan dengan hal tersebut, kurun waktu pencapaian harus ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Terkait dengan waktu pencapaian, pelayanan pengelolaan sampah oleh Dinas PKPLH sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan, Kurun waktu yang dilakukan oleh dinas dalam pelayanan pengelolaan sampah yakni sehari sekali

melakukan pengangkutan sampah dari sumbernya oleh petugas lapangan Dinas PKPLH dengan rentang waktu pada pukul 06.30 WIB pagi.

b) Sasaran

Sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua masyarakat tercakup dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Selain masyarakat sebagai sasaran pengelolaan sampah, terdapat juga sasaran dari pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus yaitu terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus serta Tim Penggerak PKK sudah menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Dengan adanya PHBS maka masyarakat mengelola sampahnya dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada.

2) Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, sosialisasi, dan pengembangan konsesus mengenai pelayanan pengelolaan sampah dengan organisasi atau pihak ketiga lainnya. Dalam fenomena integrasi terbagi menjadi dua sub fenomena sebagai berikut :

a) Prosedur

Prosedur merupakan tahap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam tata cara pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai maupun petugas dinas. Prosedur dibuat dalam pelayanan publik bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan maupun kesalahan agar tercipta kejelasan dalam pelaksanaannya dan tercipta efisiensi waktu.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur yang ada. Adapun SOP Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Warga membuang sampah di tong sampah yang sudah tersedia di depan rumah
- Petugas dari DPKLH menentukan sistem pelayanan dengan memiliki kemungkinan sebagai berikut :
 - Pengambilan dan pengangkutan sampah oleh DPKPLH dari sumber ke TPA
 - Pengambilan dan pengangkutan sampah oleh DPKPLH dari TPS ke TPA
 - Pengambilan dan pengangkutan sampah oleh masyarakat langsung ke TPA

b) Proses Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai pelaksana pelayanan memiliki kemampuan dalam melaksanakan sosialisasi untuk memperluas informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam kegiatan sosialisasi dengan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, sosialisasi di sosial media, hingga menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh desa, kelurahan, atau organisasi lainnya. Seperti contohnya Dinas melakukan kerjasama dengan PT Pegadaian dan juga para pelaku usaha sebagai salah satu penghasil sampah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan materi pengelolaan sampah. Namun, masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

3) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungan. Kemampuan dalam beradaptasi biasanya terjadi penyesuaian prosedur standar operasi sesuai dengan situasi dan kondisi perubahan lingkungan.

Terkait dengan adaptasi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Kabupaten Kudus dapat diamati melalui sub fenomena sebagai berikut:

a) Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kemampuan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses pelayanan baik secara teknis maupun nonteknis mengenai operasional pelayanan. Peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh Dinas adalah Pelatihan Pegawai DPKPLH, Forum konsultasi Publik, monitoring dan evaluasi setiap bulan, dan apel pagi dengan melakukan review kegiatan.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sejumlah fasilitas yang tersedia dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai alat pendukung dalam pelayanan pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PKPLH seperti Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pembuangan Akhir, Pusat Daur Ulang (PDU), kendaraan dinas sampah seperti dumptruck, becak motor, becak sampah, container sampah. Diketahui bahwa fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup lengkap. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi beberapa sarana dan prasarana mengalami kerusakan baik kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Bahkan untuk TPA Tanjungrejo sudah dalam keadaan *overload* dalam menerima buangan sampah. Pusat Daur Ulang juga belum beroperasi dengan optimal.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

Faktor Penghambat kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Sasaran

Sasaran dari pelayanan pengelolaan sampah ini adalah masyarakat Kabupaten Kudus yang diharapkan berperan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat Kabupaten Kudus sebagai target sasaran memperlihatkan tingkat antusias yang

masih rendah untuk berpartisipasi dan berperan dalam pengelolaan sampah. Hal lain yang berkaitan dengan faktor sasaran adalah tidak semua masyarakat Kudus tercakup pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

2. Sosialisasi

Sebagai salah satu upaya sosialisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus mengajak seluruh warga Kabupaten Kudus untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan sampah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus menyebarluaskan informasi melalui sosial media seperti *facebook*, *Instagram*, dan *X (twitter)*, sosialisasi melalui radio, pemasangan spanduk di pinggir jalan, atau mengikuti forum-forum diskusi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus melalui sosial media nyatanya tidak sejalan dengan keikutsertaan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki akun di sosial media. Hal ini tentu saja menjadikan hambatan dalam proses sosialisasi.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki dinas sudah cukup beragam dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, mulai dari arm rool, dump truck, becak motor, besak sampah, Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sarana dan prasarana tersebut sudah cukup baik, hanya saja memerlukan perbaikan khusus untuk kendaraan pengangkut sampah karena terjadi kerusakan kecil hingga kerusakan besar. Salah satu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus yang memerlukan perhatian khusus adalah fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU). Pusat Daur Ulang yang dimiliki pemerintah nyatanya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan BBM Solar dan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengoperasian Pusat Daur Ulang. Ketidakefektifan pemanfaatan Pusat Daur Ulang ini tentu saja akan berdampak pada penanganan masalah sampah di Kabupaten Kudus (Rustiyan, 2022)

KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam hal ini, di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus merupakan perangkat daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus juga bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasang lingkungan.

Pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dikatakan belum efektif karena masih memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Sasaran dalam pengelolaan sampah yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Kudus, namun pada kondisi dilapangan menyebutkan bahwa belum semua masyarakat Kabupaten Kudus tercakup dalam pelayanan pengelolaan sampah yang dibina oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. selain itu hambatan lainnya juga muncul pada fenomena proses sosialisasi yang belum efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus belum masih dan intensif sehingga menyebabkan masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana dalam kebijakan pengelolaan sampah juga belum berjalan dengan efektif akibat masih terdapat kendaraan pengangkut sampah yang dalam kondisi rusak ringan ataupun rusak sedang. Selain itu, fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) juga belum maksimal dalam pengoperasioannya dikarena keterbatasan anggaran untuk bahan bakar solar dan keterbatasan sumber daya manusia sebagai operator PDU.

Faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus yakni sasaran masyarakat yang belum tercakup semuanya, proses sosialisasi yang kurang masif dan intensif, serta sarana dan prasarana yang memerlukan anggaran tambahan, peningkatan jumlah sumber daya manusia, dan perbaikan kendaraan pengangkut sampah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau dalam berperan dan ikut serta dalam pengelolaan sampah bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus harus melaksanakan sosialisasi secara masif dan intensif. Sosialisasi melalui media sosial hendaknya terus dilakukakan secara rutin dengan melakukan pembaharuan informasi sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan secara offline hendaknya dapat lebih gencar dan meluas lagi cakupannya, mulai dari tingkat anak sekolah, remaja, hingga orang lanjut usia dengan melalui pendekatan yang sesuai.
- 3) Saran yang dapat diberikan mengenai sarana dan prasarana adalah pemanfaatan kembali secara optimal Pusat Daur Ulang agar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tujuan pengurangan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hesel Nogi S, T. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pemikiran*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik .
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gavamedia.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Kudus. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah* .
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Binaman Aksara.
- Rustiyani, N. (2022, November 22). Pusat Daur Ulang Sampah Kudus Belum Beroperasi Maksimal. *Zonanews.Id*. <https://zonanews.id/pusat-daur-ulang-sampah-milik-pemkab-kudus/daerah/jawa-tengah/>
- Steers, M. R. (2015). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Toha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana.